

**IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN
KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN
PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)**

DISERTASI

Oleh

R. ARYO HATMOKO
2207190003



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN
KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN
PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

R. ARYO HATMOKO
2207190003



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. ARYO HATMOKO
NIM : 2207190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN
KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK
PUSAT DAN KEPABEANAN)”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 09 Juli 2025



R. ARYO HATMOKO
NIM: 2207190003



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN
KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN
PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)**

Oleh:

Nama : R. ARYO HATMOKO
NIM : 2207190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 09 Juli 2025

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor I

Co Promotor II

Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 981456/0314086404

Dr. Fauzan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 160692/ 8879530017



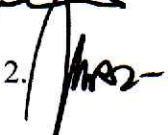
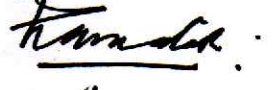
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 09 Juli 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : R. ARYO HATMOKO
NIM : 2207190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	3. 
4	Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Penguji	4. 
5	Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., S.H., M.Si, M.H.	Penguji	5. 
6	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	6. 
7	Dr. Ir. Ketut Silvanita Mangani, M.A.	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI
DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)**

Nama : R. ARYO HATMOKO
NIM : 2207190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 09 Juli 2025

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur,
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.

NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R. ARYO HATMOKO
NIM : 2207190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2025



R. ARYO HATMOKO
NIM: 2207190003



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor: 0684/UKI.PPS/HKP.03.01/2025

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Juli 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0684/UKI-PPS/HKP.03.01/2025
Tanggal : 03 Juli 2025



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

3.	Rabu, 09 Juni 2025	10.00 - 12.00 WIB	R. Aryo Hatmoko NIM. 2207190003	IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRISI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEJARAN)	1. Prof. Dr. Dhamiswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Aarce Tehupetory, S.H., M.H. 4. Dr. Fauzan, S.H., M.H. 5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 6. Dr. Ir. Serrama Sibutarbutar, S.E., S.H., M.Si., M.H. 7. Dr. Ir. Ketut Silvanita Mangani, M.A.	Ketua Penguji Sekretaris / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji Eksternal
----	-----------------------	----------------------	------------------------------------	--	---	---

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dreescode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasar

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesempatan sehingga penulis dapat memiliki semangat dan keinginan untuk menyelesaikan dan menghasilkan suatu karya tulisan terbaik. Semoga semangat, keinginan untuk menjadi lebih baik dan lebih paham tentang ilmu hukum, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, selalu terpupuk dan terpelihara dengan baik.

Penelitian ini diawali dengan semangat untuk melakukan perbaikan dalam pengaturan perpajakan. Konsep Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya dalam memaknai Pasal 23A UUD. Didasari kondisi yang sekarang terjadi, maka penulis berusaha membangun model pengembangan pada peraturan perpajakan yang berpihak pada rakyat. Otoritas penguasa saat ini membuat kerancuan pada penggunaan dasar peraturan perpajakan yang lebih ditekankan pada unsur penerimaan negara dari pada sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi. Penegakan hukum perpajakan saat ini menimbulkan efek hukum dalam pelaksanaannya. Banyaknya peraturan kebijakan yang dirumuskan secara sendiri oleh Kementerian Keuangan dan aparat di bawahnya yang kemudian diterapkan secara kaku.

Dalam tulisan-tulisan yang membahas ilmu perundang-undangan tidak mengatur secara rinci jenis dan peraturan yang mana saja dapat dipergunakan otoritas penguasa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya berusaha mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki dan kewenangannya. Namun dalam prakteknya tidak mampu menyediakan sarana yang tepat bagi eksekutif sehingga digunakan kekuasaan diskresi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memberikan model pengembangan yang ideal terhadap peraturan perpajakan berbasis pada kerakyatan.

Penulis menyadari, bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof.Dr. John Pieris, S.H.,M.H.,M.S. selaku Promotor, Dr. Aartje Tehupeoiry,S.H.,M.H.,CIQaR, CIQnR Ko-Promotor I dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H. selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI)
4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Tim penguji pada Ujian Usulan Penelitian, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya disertasi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini. Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Istri dan Anak serta pihak-pihak lain yang mendukung penulisan rencana penelitian. Penulis sangat menyadari, bahwa usulan penelitian disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya usulan penelitian disertasi ini dapat disetujui untuk dilanjutkan dalam penelitian disertasi.

Jakarta, 09 Juli 2025



R. Aryo Hatmoko
2207190003



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR KEASLIAN	vi
SK DEWAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	44
C. Rumusan Masalah	45
D. Tujuan Penelitian	45
E. Kegunaan Penelitian	46
1. Kegunaan Teoritis	46
2. Kegunaan Praktis	46
F. Kerangka Teori	46
1. Teori Konstitusi	46
2. Teori Negara Hukum.....	57
3. Teori Kewenangan.....	70
4. <i>Teori Stufenbau</i>	75
5. Negara Kesejahteraan	78
G. Metode Penelitian	86
1. Pendekatan Penelitian	86
2. Spesifikasi Penelitian	87
3. Jenis dan Sumber Data	87
4. Teknis Pengumpulan Data	88
5. Teknik Analisis Data	88
6. Lokasi Penelitian	89
7. Orisinalitas Penelitian	89

BAB II	SEJARAH DAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	90
	A. Sejarah Pemungutan Pajak.....	90
	B. Pengertian Pajak.....	132
	C. Sistem Pajak di Indonesia.....	136
	D. Pemungutan Pajak.....	161
	E. Hak Memungut Pajak.....	182
	F. Rumus Pajak (Tax Formula)	185
	G. Pungutan Lainnya.....	187
	H. Struktur Pajak di Indonesia.....	188
BAB III	IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN	195
	A. Makna Filosofis Pasal 23A UUD 1945.....	206
	B. Asas-Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Pajak.....	221
	C. Implementasi Pasal 23A dalam Pembentukan Peraturan Perpajakan.....	230
	D. Kewenangan Atribusi dan Diskresi dalam Penyusunan Peraturan Perpajakan.....	237
	E. Implikasi Pembentukan Peraturan Menteri.....	304
	F. Implikasi dan Tantangan Implementasi Pasal 23A dalam Peraturan Pajak	320
BAB IV	SOLUSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG.....	247
	A. Keterlibatan Menteri dan Direktur Jenderal Dalam Peraturan Pelaksanaan.....	348
	B. Solusi Pembentukan Peraturan Perpajakan di bawah Undang-Undang.....	407
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	475
	A. Kesimpulan	475
	B. Saran	483
	Daftar Pustaka	489

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23A disebutkan, bahwa “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Selanjutnya pada pasal 28H ayat (4) disebutkan, bahwa Setiap orang berhak “*mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun*”. Dari dua pasal tersebut sangat jelas diatur mengenai perlindungan hak warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Dengan dasar pertimbangan pasal-pasal tersebut, pengaturan tentang perpajakan, yang bersifat memaksa dan tidak berkontribusi langsung terhadap masyarakat harus merupakan hasil kesepakatan antara pihak legeslatif sebagai wakil rakyat dengan eksekutif pelaksana pengaturan dan pemungutan pajak. Namun demikian, dengan dasar pertimbangan keperluan penerimaan negara selain adanya atribusi dari undang-undang, maka pengaturan perpajakan juga diatur dengan diskresi Peraturan Menteri Keuangan bahkan juga peraturan Direktur Jenderal yang bersifat peraturan kebijakan (*beleids regel*).

Dalam peraturan perpajakan diatur ketentuan yang bersifat keharusan atau kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat, yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau diatur dalam peraturan atribusi juga peraturan kebijakan. Pengaturan perpajakan yang bersifat kebijakan ini menjadi berlawanan dengan UUD 1945. Tibor R. Machan menyatakan apabila pajak dikenakan diluar yang diatur atau tidak berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk kesewenangan (*Taxation without representation is tyranny*). Dalam tulisan ini akan diuji keberlakuan peraturan perpajakan tersebut terhadap maksud yang terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945. Dalam pengaturan perpajakan memiliki dasar filosofi khusus sesuai Pasal 23A UUD 1945 serta filosofi dari arti pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam teori konstitusi, teori pembentukan hukum serta konsep teori validitas dan kepastian hukum yang mencakup perlindungan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum bila ditelaah dengan aturan yang ada di atasnya yang mengatur secara tegas tentang syarat pengaturannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) khususnya peraturan perpajakan. Penelitian ini bersifat normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan. Jenis data yang utama adalah data sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) yaitu studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan. Data yang diambil adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau data pustaka dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa konsep penerimaan negara, yang selama ini menjadi prioritas tindakan telah menimbulkan pembentukan peraturan perpajakan di luar batas kewenangan, tujuan negara hukum dan konsep kedaulatan rakyat. Kementerian Keuangan dan pejabat perpajakan memiliki kekuasaan dan kekuatan tidak hanya bidang administrasi tetapi juga di bidang pidana, yang berlebih yang kemudian ditakuti oleh masyarakat. Kondisi yang kemudian berlawanan dengan maksud Pasal 23A UUD.

Kata Kunci

Pajak, Peraturan, Kebijakan, Keadilan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

In accordance with Article 23A of the 1945 Constitution, it is stated that "Taxes and other levies of a compelling nature for state purposes shall be regulated by law". Furthermore, Article 28H (4) states that every person has the right "to have private property rights and such property rights shall not be taken over arbitrarily by any person". These two articles clearly regulate the protection of citizens' rights against government power. Based on the consideration of these articles, the regulation of taxation, which is coercive and does not contribute directly to society, must be the result of an agreement between the legislature as the people's representative and the executive implementing the regulation and collection of taxes. However, on the basis of state revenue and delegation from the law, the regulation of taxation can be regulated by the discretion of the Minister of Finance Regulation and even the regulations under it which are policy regulations.

The tax regulations stipulate provisions that are mandatory or obligations imposed on the community, which are not explicitly regulated in the law. This policy taxation regulation is contrary to the 1945 Constitution. Tibor R. Machan stated that if taxes are imposed outside those regulated or not based on the law, it is a form of arbitrariness (Taxation without representation is tyranny). This paper will examine the enforceability of the tax regulations against the intent contained in Article 23 A of the 1945 Constitution. This research uses an approach in constitutional theory, law formation theory and the concept of validity theory and legal certainty which includes legal protection, legal justice, legal certainty when examined with the existing rules above which expressly regulate the terms of regulation.

The method used in this research uses a normative juridical approach by analyzing the problems associated with legislation (statute approach), especially tax regulations. This research is normative in nature, namely analyzing laws and regulations. The main type of data is secondary data which is analyzed through literature study. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents relevant to research in the library. The data taken is secondary data, namely data taken from second sources or library data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

From the results of the research, it is obtained that the concept of state revenue, which has been the priority of action, has led to the formation of tax regulations beyond the limits of authority, the objectives of the rule of law and the concept of popular sovereignty. The Ministry of Finance and taxation officials have power and strength not only in the administrative field but also in the criminal field, which is excessive and then feared by the public. This is contrary to the intent of Article 23 A of the Constitution.

Key Word *Taxes, Regulations, Policies, Justice, Legal*